BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Perusahaan Umum Listrik Negara di Indonesia pada mulanya di monopoli oleh perusahaan swasta Belanda, seperti yang pada mulanya di tahun 1905 di Kota Bandung berdiri Perusahaan Listrik milik Pemerintah Kolonial Belanda dengan nama BEM (*Bandoengsche Electricieteit Maastcappij*) dengan tujuan membangun jaringan khusus untuk Kota Bandung dan sekitarnya. Selanjutnya BEM diubah menjadi Perusahaan Perseorangan dengan nama GEBEO (*Gemeenschapplijk Electricieteit Bedrijf en Omstreken Voor Bandoeng)*

Pada tahun 1913 berdiri LWB (*Land Waterkraont Bedriff*) yang bergerak di bidang usaha penyaluran dan pembangkit tenaga listrik mempunyai wilayah kerja di seluruh Indonesia.

Tahun 1919 dibuat akte perusahaan perlistrikan dihadapan notaries Mr. Andrian Hendrik Van Opsen di Batavia dengan akte no. 213 tanggal 31 Desember 1919. Kemudian BEM dihapus dan diganti menjadi GEBEO, resminya pada tanggal 1 Januari 1921. GEBEO berdiri di Bandung, dan merupakan perusahaan swasta yang mendapat ijin konsesi di Jawa Barat kecuali kota Cirebon, Jakarta dan Tangerang.

Pada masa penjajahan Jepang pendistribusian listrik diusahakan oleh Djawa Denki Djiayo Sha Bandungshisa, sedangkan untuk pembangkit dan

penyaluran dilakukan oleh dua instansi yaitu Sei Boe Doxo pada periode tahun 1943-1945.

Pada masa perjuangan fisik, kelistrikan di Negara kita khususnya di Jawa Barat dilaksanakan oleh Pemerintaha Republik Indonesia dengan nama Jawatan Listrik. Belanda masuk ke Indonesia setelah merdeka pada tahun 1948. Penguasa dan pendistribusian tenaga listrik khususnya di Jawa Barat dan Jakarta diusahakan oleh GEBEO kembali. Sedangkan pembangkit dan penyebaran tetap dikuasai dan dikelola oleh Pemerintahan Republik Indonesia yaitu oleh Perusahaan Negara.

Pada tahun 1957 terjadi nasionalisasi Perusahaan Listrik Asia. Dengan adanya Undang-undang no. 86 tahun 1957 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda JO Peraturan Pemerintah tentang penentuan Perusahaan Listrik dan Gas Milik Balanda yang dikenakan nasionalisasi, maka semua perusahaan Listrik dan Gas Milik Belanda yang belum di nasionalisir dikenakan nasionalisasi. Begitu juga GEBEO yang sebelumnya dikuasai oleh pihak Belanda kemudian diambil alih oleh Pemerintah Indonesia tepatnya pada tanggal 27 Desember 1957.

Sehubungan dengan kejadian itu maka dikeluarkan peraturan pemerintah no. 18 tahun 1959 tentang pembentukan Perusahaan Listrik atau Gas Belanda yang dikenakan nasionalisasi.

Tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPUPLN). Pendirian ini didasarkan kepada Undang-Undang No.19 tahun 1960 tanggal 30 April 1960 tentang pendirian BPUPLN ditetapkan surat tertanggal 1 Januari 1961. Susunan organisasi BPUPLN ditetapkan Surat Keputusan Mentri

Pekerjaan Umum dan Tenaga No. Ment. 15/I/20 tanggal 20 Mei 1960. BPUPLN terdiri atas 14 exploitasi yakni :

1. Exploitasi I sampai X menguasai dan mengelola pembangkit dan menyalurkan pendistribusian listrik di luar wilayah Jawa Barat.
2. Exploitasi XI sampai XII menguasai dan mengelola pendistribusian listrik diwilayah Jawa Barat dan Jakarta Raya.
3. Exploitasi XII mengusasi dan mengelola pembangkit pendistribusian listrik untuk wilayah Jawa Barat melalui sektor-sektro Jakarta, Bogor, Priangan dan Cirebon.
4. Exploitasi XIV khusus menguasai dan mengelola perusahaa Gas di seluruh Indonesia.

Pada tahun 1972 terjadi perubahan dari Perusahaan Listrik Negara berubah menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara. Hal ini diatur dalam peraturan Pemerintah No. 18 tahun 18972 tentang perusahaan Listrik Negara dalam Bab I pasal 1 dan 2 yang menjelaskan tentang status Perusahaan Listrik Negara.

1. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 965 ditegaskan statusnya menjadi suatu Perusahaan Umum (Perum). Sebagaimana yang termasuk dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 19 tahun 1969 dengan nama Listrik Negara yang selanjutnya dalam peraturan pemerinatah ini disebutkann perusahaan yang dilakukan usaha-usaha hanya berdasarkan Pemerintah.
2. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972, maka ketentuan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah No. 30

tahun 1970 sepanjang mengenai Anggaran Dasar Perusahaan Listrik Negara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Peraturan Mentri PUTL No. 013/Prt/1975 tanggal 9 September 1975 PLN mengadakan reorganisasi yang menyangkut nama, tugas dan wilayah-wilayah kerja di daerah.

Berdasarkan pengumuman No. 05/D-III/Sek/1975 tanggal 14 Juni 1975, maka Perum Listrik Negara Exploitasi XI dirubah menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi III (PLN Distribusi III) dan berikutnya dirubah lagi menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat dan Banten. Kemudian pada tahun 1994 atau tepatnya pada tanggal 1 Agustus 1994 status Perum Listrik Negara Menjadi PT. PLN (Persero).

Mengacu Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.120.K/010/DIR/2002 tanggal 27 Agustus 2002 berubah lagi namanya menjadi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten wilayah kerjanya meliputi Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten hingga saat ini.

Kantor PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten merupakan kantor pusat wilayah yang bertugas mendistribusikan tenaga listrik kepada konsumen, baik konsumen perorang, rumah tangga maupun konsumen industri yang dibantu oleh seluruh Area Pelayanan Jaringan (APJ) dan Area Pengatur Distribusi (APD) di propinsi Jawa Barat dan propinsi Banten. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten membawahi 17 APJ dan 1 APD, yaitu :

Ditribusi Jawa Barat dan Banten membawahi 17 APJ dan 1 APD yaitu :

1. PLN APJ Cirebon
2. PLN APJ Garut
3. PLN APJ Tasikmalaya
4. PLN APJ Majalaya
5. PLN APJ Bandung
6. PLN APJ Cimahi
7. PLN APJ Sumedang
8. PLN APJ Sukabumi
9. PLN APJ Cianjur
10. PLN APJ Banten Utara
11. PLN APJ Banten Selatan
12. PLN APJ Purwakarta
13. PLN APJ Karawang
14. PLN APJ Bogor
15. PLN APJ Bekasi
16. PLN APJ Gunung Putri
17. PLN APJ Depok
18. APD Bandung

Sedangkan PT. PLN (Persero) Satuan Kerja Listrik Perdesaan Jawa Barat, berdasarkan surat tugas bagi pegawainya, merupakan bagian dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, yang mempunyai struktur organisasi dan job description sendiri, karena Satuan Listrik Perdesaan Jawa Barat bertugas mengelola anggaran yang bersumber dana APBN dengan lingkup pekerjaan di Propinsi Jawa Barat (Propinsi Banten masuk ke PT.PLN (Prsero) Satuan Kerja Listrik Perdesaan Banten).

Arti dan lambang PT.PLN (Persero)

Setiap perusahaan senantiasa dilengkapi dengan lambang perusahaan, lambang mempunyai arti penting bagi suatu perusahaan dan merupakan lambang tanda pengenal yang tetap, bahkan lambang itu pun mencerminkan keberadaan perusahaan.

PT. PLN (Persero) mempunyai suatu lambang yang berbentuk petir atau kilat yang telah lama dipakai oleh PT.PLN (Persero) beserta satuan-satuannya. Berikut ini merupakan keterangan penggunaan lambang PT. PLN (Persero) menurut Surat Keputusan nomor. 013/DIR/1976

Gambar 3.1
Lambang Dasar Perusahaan



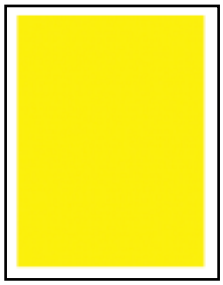
Sumber : www.pln-jabar.co.id

Berwarna kuning keemasan, berbentuk segi empat dan berkala ukuran lebar : panjang (3: 4) tanpa garis pinggir, bila diperlukan penggambaran segi empat tersebut, dapat digunakan garis pinggir sebagai batas. Tanpa tulisan Listrik Negara atau tulisan-tulisan lain didalamnya, Gambar atau lembaga PT.PLN (Persero) terdiri dari :

A. Bidang Persegi Panjang Vertikal

Gambar 3.2

Bidang Persegi Panjang Vertikal



Sumber : www.pln-jabar.co.id

Bidang persegi panjang vertikal di atas merupakan bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya, melambangkan bahwa PT.PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PT.PLN (Persero) bahwa listik mampu menciptakan penserahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-menyala yang dimiliki oleh tiap insan yang berkarya diperusahaan ini.

B. Petir atau Kilat

Gambar 3.3

Petir atau Kilat



Sumber : www.pln-jabar.co.id

Gambar 3.3 ini melambangkan tenaga listrik yang terkandung didalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilakan oleh perusahaan. Selain itu petir juga mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT. PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya.

Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman.

C. Tiga Gelombang

Gambar 3.4

Tiga Gelombang



Sumber : www.pln-jabar.co.id

Memiliki arti gaya rambat energy listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu, pembangkit, penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT. PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya.

Diberi warna biru untuk memberikan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Disamping itu biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya.

3.2 Misi dan Visi Perusahaan

A. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.

   Konsekuensi terhadap strategi korporat :

   1. Mencari dan memanfaatkan peluang usaha secara berkesinambungan di bidang bisnis kelistrikan dan usaha lain yang terkait.
   2. Mengembangkan budaya pelayanan.
   3. Menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
   4. Anggota perusahaan perlu menyadari bahwa bisnis kelistrikan adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
   5. Berusaha secara konsisten untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kelistrikan.

B. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Konsekuensi terhadap strategi korporat :

1. Mengembangkan dan menjalankan bisnis kelistrikan sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat.
2. Mengembangkan usaha kelistrikan yang selaras dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi di pasar yang kompotitif.

C. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.

Konsekuensi terhadap stategi korporat :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan produktif.
2. Memacu pemanfaatan energy listrik secara tepat guna dan membarikan nilai tambah bagi sektor ekonomi.
3. Menjadi pelopor dalam membangun masyarakat yang sadar dan cinta lingkungan.

D. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Konsekuensi terhadap strategi korporat adalah membangun dan mengoperasikan fasilitas kelistrikan yang akrab dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Sedangkan visi dari PT. PLN (Persero) Satuan Kerja Listrik Perdesaan Jabar sendiri adalah dapat diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang tumbuh berkembang unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

3.3 Pengertian Struktur Organisasi

Menurut Edwin B.Flippo (1996:107) struktur adalah kerangka dasar dari hubungan formal yang telah disusun untuk membantu untuk mengatur dan mengarahkan usaha – usaha yang dilakukan dalam organisasi sehingga usaha – usaha itu terkoordinir dan konsisten dengan sasaran organisasi.

Dapat disimpulkan oleh penulis struktur merupakan suatu alat yang formal untuk mengatur dan membantu dalam mengkoordinir seluruh sasaran – sasaran yang telah ditentukan oleh suatu organisasi agar sasaran tersebut tercapai

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (1996:123) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, bersturktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu, organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.

Menurut penjelasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa organisasi adalah suatu sistem atau alat dan wadah yang terkoordinasi yang didalamnya terdapat pengawasan dan pengarahan guna mencapai tujuan tertentu.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (1996:131) Struktur Organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi keseluruhan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan system pimpinan organisasi. Sedangkan menurut The Liang Gie dalam Malayu Hasibuan (1996:131) struktur organisasi adalah kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan – hubungan diantara bidang – bidang kerja maupun orang – orang yang menunjukan kedudukan dan peranan masing – masing dalam kebulatan kerja sama.

Berdasarkan dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi adalah petunjuk untuk memudahkan dalam mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing serta rentan kendali yang digambarkan dalam suatu bentuk kerangka gambar.

Dalam PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten ini, struktur organisasi yang digunakan adalah struktur Organisasi Staf dan Lini, hal ini dapat dilihat adanya staf (Pekerja APJ) yang turut membantu dalam pelaksanaan pekerjaan tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memberikan perintah untuk melaksanakan usulan-usulannya. Staf disini dapat dikoordinasi dalam sebuah organisasi yang berbeda diluar organisasi garis, artinya staf mempunyai pegawai-pegawai tersendiri tetapi tidak mempunyai hubungan langsung dengan tingkat organisasi perusahaan.

Kelebihan dari system garis dan staf adalah sebagai berikut :

1. Tugas yang sangat berat bagi pimpinan dalam organisasi garis bisa dikurangi dengan adanya staf.
2. Tetap terjamin adanya pimpinan tunggal dalam perusahaan, sebab staf tidak ikut campur tangan dalam urusan perusahaan.

Kelemahan dari system garis dan staf adalah sebagai berikut :

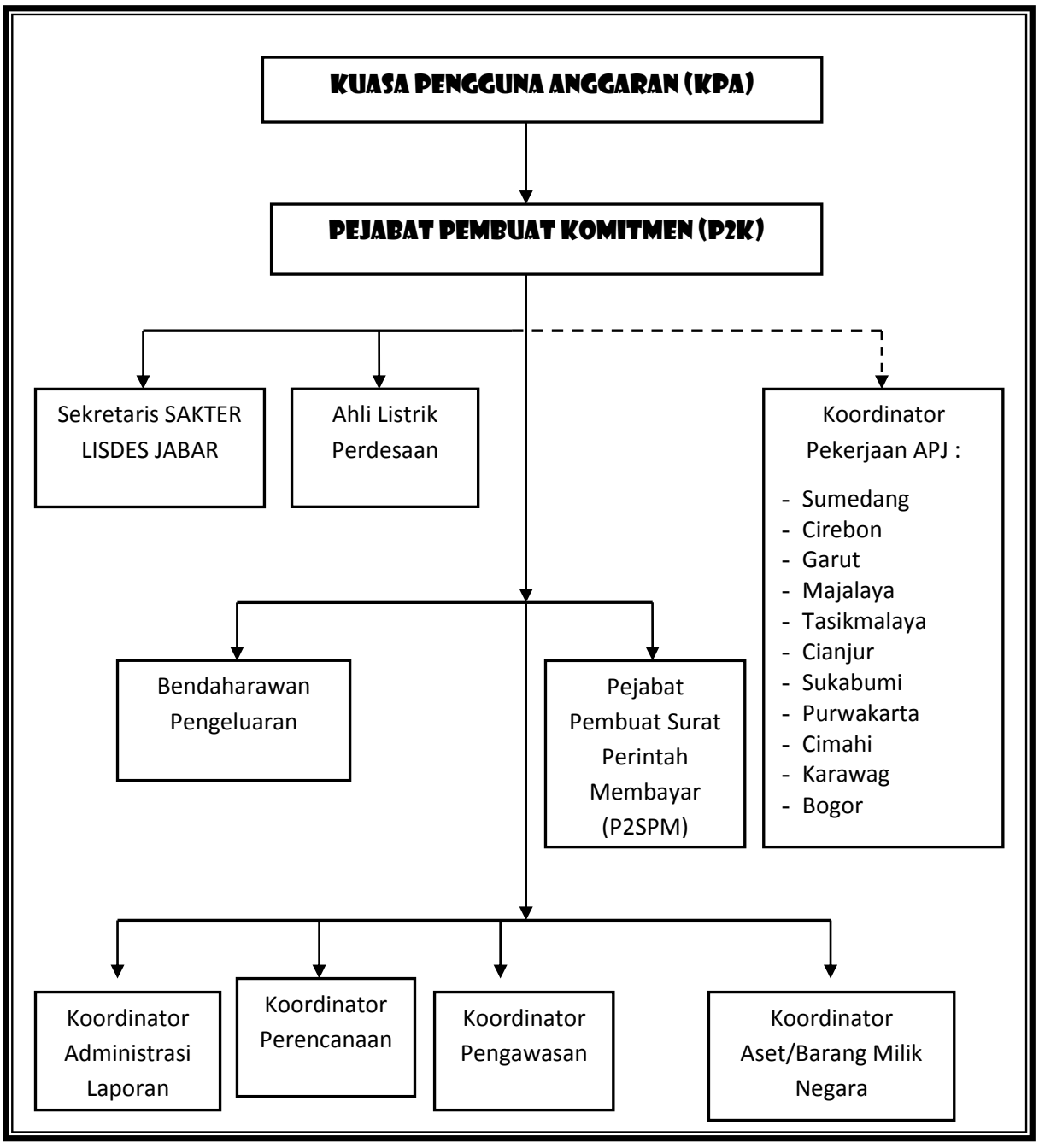
1. Kemungkinan timbul perselisihan antara staf dan pimpinan.
2. Petunjuk-petunjuk dari staf, mungkin hanya bersifat teoritis kurang memperhatikan soal praktek. Ini menimbulkan ketegangan dengan pihak pelaksana. Perbadaan pendidikan, sikap dan mentalitas akan memperbesar pertentangan.

3. Nasehat yang diberikan atau data yang telah dikumpulakan oleh staf tidak dipergunakan oleh pimpinan. Ini berarti pengeluaran biaya sia-sia.
4. Ada pula pimpinan sangat tergantung kepada staf sehingga pimpinan kurang berani mengambil inisiatif dan tidak kreatif.

Adapun struktur organsasi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dapat dilihat dalam lebar berikut ini.

Gambar 3.5

Struktur Organisasi Listrik Perdesaan Jawa Barat



Sumber : PT. PLN (Persero) Satuan Kerja Listrik perdesaan Jawa Barat, 2009

3.4 Job Description

Pada PT. PLN (Persero) Satuan Kerja Listrik Perdesaan Proyek Listrik Desa terdapat tujuh bagian yang memiliki tugas-tugas yang berbeda, diantaranya adalah :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K)

   Pejabat pembuat Komitmen (P2K) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Listrik Perdesaan Jawa Barat dan Banten dalam mencapai sasaran usaha yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahunan, serta bertanggung jawab dari segi keuangan dan segi fisik atas pelaksanaan kegiatan.

2. Sekretaris Listrik Perdesaan (SEKLISDES)

   Sekretaris Listrik Perdesaan (SEKLISDES) mempunyai tugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam bidang pelaksanaan administrasi kegiatan, pengolahan data atau informasi, laporan kegiatan atau laporan evaluasi serta tugas yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

3. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (P2SPM)

   Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar mempunyai tugas untuk memeriksa kelengkapan berkas dokumen SPP, mencata dalam buku pengawasan SPP, menyimpan atau mengarsipkan seluruh bukti asli dalam lampiran SPP yang diajukan oleh P2K dan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana.

4. Bendaharawan Pengeluaran

Bendaharawan Pengeluaran mempunyai tugas untuk melaksanakan pembukuan dan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan, menyiapkan berita acara pemeriksaan kas tiga bulan sekali, selaku wajib pungut harus menyetorkan hasil pungutan ke Kas Negara.

5. Koordinator Teknis Administrasi dan Laporan

   Mempunyai tugas membantu Pejabat Pembuat Komitment dalam bidang pelaksanaan administrasi kegiatan dan laporan serta tugas lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

6. Koordinator Teknis Perencanaan

   Mempunyai tugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam bidang perencanaan melaksanakan perekayasaan engenering dan menyusun rencana pengelolaan pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik.

7. Koordinator Teknis Pengawasan

   Mempunyai tugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik.